

## Perencanaan Fasilitas Sektor Pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Desa Cintaratu dan Selasari)

Muhamad Iqbal Viqri Priatna<sup>1</sup> Rizky Ilhami<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [miqbalvp12@gmail.com](mailto:miqbalvp12@gmail.com)<sup>1</sup> [rilhmi27@gmail.com](mailto:rilhmi27@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Perencanaan pariwisata memberikan pengetahuan dasar untuk pembangunan dan menentukan tujuan dari pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Perencanaan disampaikan oleh John Friedmann mengandung empat unsur utama, yaitu (1) perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi (2) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; (3) perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan dan (4) perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Potensi Wisata



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Keberagaman objek pariwisata yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan pendorong perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, baik secara kuantitas kunjungan wisatawan maupun sumbangan Pendapatan Asli Daerah dan devisa yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata di Indonesia terus meningkat. Bahkan sumbangan devisa sektor pariwisata ini berada pada posisi empat besar setelah minyak, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Selain itu pariwisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu pengembangan pariwisata sangat diperlukan. Dalam pengembangan suatu objek wisata harus memenuhi beberapa kriteria agar Objek Wisata dapat diminati oleh Wisatawan.

Kebijakan pariwisata memberikan pengetahuan dasar untuk pembangunan dan menentukan tujuan dari pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Dalam Perda No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tersurat bahwa pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata memegang peranan penting untuk pengembangan wilayah, melalui pengembangan kawasan andalan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, secara internal pengembangan pariwisata ini diharapkan turut menyumbang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah sekitarnya.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sangat serius untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan pada rencana induk pembangunan pariwisata nasional tiga diantaranya berada di provinsi Jawa Barat, yaitu;

Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan Destinasi Pangandaran. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 48 tahun 2006, Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana induk pengembangan pariwisatanya (RIPPDA Jawa Barat). Wilayah Jawa Barat kini menjadi daerah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi sumber daya alam yang cukup melimpah (Gumilar, 2005) serta berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Salah satu kawasan wisata andalan di Provinsi Jawa Barat adalah area wisata Pangandaran, dimana di kawasan tersebut mempunyai beberapa kawasan pengembangan pariwisata yang cukup potensial.

Pangandaran merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata dengan kondisi alam yang sangat indah serta memiliki tempat tujuan wisata yang sangat menarik. Kondisi alam yang masih asri ditambah dengan pemandangan yang di kelilingi hamparan pantai, salah satu Kecamatan yang berada di Pangandaran adalah Kecamatan Parigi. Kecamatan Parigi menjadi salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran yang saat ini tengah melakukan pembenahan dan pengembangan, salah satunya di sektor pariwisata yang didalamnya memiliki keunggulan seperti sumberdaya alam yang indah, lokasi geografis yang mudah diakses, dan memiliki keragaman hayati. Banyak terdapat Objek Wisata yang berada di Parigi yaitu Pantai Batuhiu, Santirah, Jogjogan, Green Valley, dan GOA Lanang serta masih banyak destinasi wisata lainnya yang terdapat di Parigi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kelangsungan usaha pada Objek Wisata di Kecamatan Parigi, Pemerintah menetapkan Strategi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan Wisatawan. Dengan daya tarik Wisatawan yang besar maka fasilitas yang dipersiapkan di Kecamatan Parigi pun harus baik. Hal ini penting bagi keberlangsungan hidup Objek Wisata di Kecamatan Parigi.

Claire A. Gunn (1993: 141) menegaskan bahwa ada beberapa hal penting di dalam fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan kepariwisataan, yaitu antara lain: Pertama, perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, disamping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas wahana yang dapat dijual. Kedua, kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian. Ketiga, perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama publik dan privat agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi. Keempat, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata yang baik hingga pada tingkat destinasi. Kelima, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha (bisnis) untuk memberikan sumbangsuhnya kepada pembangunan daerah. Keenam, kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah dan non-profit attraction, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi (alam dan budaya) harus didukung oleh bisnis perjalanan dan akomodasi lainnya.

Sementara itu, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri. Perencanaan fasilitas dapat terjadi di sektor mana saja terlebih pada sektor pariwisata, Untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan, harus tersedia berbagai macam fasilitas, Fasilitas penunjang wisata dalam sebuah destinasi dapat mencakup sarana dan prasarana yang dapat dinikmati pengunjung selama berada di kawasan objek wisata.

Fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, sehingga dalam suatu perjalanan wisata, seluruh komponen fasilitas yang dibutuhkan tidak dapat dipisahkan. Dalam perda No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengenai pembangunan dan pengembangan sektor

pariwisata menjadi peranan penting untuk pengembangan wilayah, melalui pengembangan kawasan Pariwisata di Kecamatan Parigi, secara internal pengembangan pariwisata ini diharapkan turut menyumbang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah sekitarnya.

Di suatu destinasi wisata, taksedikit wisatawan yang merasa tidak nyaman dan aman karena kurang ya pembangunan dasar seperti jalan, pengelolaan sampah yang masi buruk serta belum optimalnya pengembangan destinasi wisata. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada destinasi wisata yang akan berkembang. Faktor kenyamanan dan keamanan pada suatu kawasan destinasi wisata merupakan nilai tambah dan menjadi peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan UNWTO (2004). Destinasi wisata di negara-negara berkembang sudah seharusnya untuk memberikan alternatif berwisata dengan jaminan fasillitas dan rasa aman bagi wisatawan selama berwisata. Menurut Taufikurahman peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyampaikan bahwa industri pariwisata dapat berkembang dengan cepat apabila didukung oleh faktor kenyamanan bagi pengunjung destinasi wisata itu sendiri. Sedangkan menurut I Ketut Sudikerta (2015), menyatakan bahwa keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu faktor yang harus terpenuhi oleh destinasi, sehingga wisatawan dapat berlibur dengan tenang tanpa hal-hal yang mengganggu (Fanani & Pangestuti, 2017).

### Landasan Teori

Perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Selain itu Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Pembangunan digunakan untuk pembangunan yang lebih besar daripada sumber daya yang tersedia Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan memanfaatkan potensi yang ada. Optimalnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya perencanaan disampaikan oleh John Friedmann. Dalam bukunya yang berjudul *Planning in the Public Domain: "From Knowledge to Action (1987)*, dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu: (1) perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi; (2) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; (3) perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan; dan (4) perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedmann ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan".

Kegiatan perencanaan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia, karena terkait dengan pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, perencanaan adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumberdaya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Conyer dan Hill (1984). Berdasarkan pendapat ini, kegiatan perencanaan sesungguhnya juga mengandung unsur kreatifitas dan keberanian dalam memberikan penilaian atas situasi saat ini dan masa depan sekaligus. Namun demikian, kreatifitas dan keberanian tersebut tidak dapat dilakukan secara membabi buta. Sehubungan dengan itu,

pentingnya keterpaduan antara sains dan pengetahuan praktis dalam kegiatan perencanaan yang menyatakan perencanaan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara rasional untuk menghadapi masa depan.

Menurut Inskeep (1991:29), terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

1. *Continous Incremental*, dan *Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada
2. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem.
3. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
4. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
5. *Environmental* dan *sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
6. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
7. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.
8. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi, yaitu data yang diperoleh berbentuk kata-kata, gambar, bukan berbentuk angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Hubberman (dalam Sugiyono 2007:204) terkait langkah-langkahnya yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam analisis data dari berbagai sumber.
2. Reduksi Data, merupakan penyederhanaan yang dilakukan dengan cara memilah-milah data serta menguji keabsahan data tersebut untuk dijadikan informasi yang aktual.

3. Penyajian data. Penyajian data khususnya pada penelitian kualitatif yakni berbentuk naratif, di mana yang berisikan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang dilakukan setelah melakukan reduksi data dan penyajian data yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari fokus penelitian ini maka dapat disampaikan tentang penemuan di lapangan mengenai perencanaan fasilitas sektor pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang di maksud dalam perencanaan fasilitas yaitu Perencanaan merupakan rangkaian proses secara sistematis yang terdiri dari beberapa kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang digunakan untuk melengkapi keperluan utama wisatawan, seperti: penginapan, rumah makan, tempat parkir dan toilet. Sehingga dapat dipahami bahwa perencanaan fasilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu perencanaan fasilitas pariwisata yang lebih memberikan arahan pengembangan fasilitas di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Kebijakan pariwisata memberikan pengetahuan dasar untuk pembangunan dan menentukan tujuan dari pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Pada kenyataannya, pengembangan pariwisata di Kecamatan Parigi saat ini terkendala pada masih kurangnya perhatian *stakeholders* terhadap pengembangan kawasan objek wisata baik dari pemerintah daerah, masyarakat ataupun pengusaha, sehingga pengelolaan kawasan belum tergali secara maksimal. Selanjutnya kontribusi sektor pariwisata dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung belum dirasakan. Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Promosi wisata kurang optimal yang menyebabkan pelaku usaha di sekitar objek wisata gulungtikar
2. Kurangnya anggaran dari pemerintah setempat yang menjadikan terhambatnya perencanaan pembangunan
3. Tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi wisata sehingga pencapaian tujuan tidak berjalan dengan baik

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perencanaan fasilitas sektor pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menggunakan empat dimensi berdasarkan John Friedmann. Dalam bukunya yang berjudul *Planning in the Public Domain: "From Knowledge to Action (1987)*. Dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu:

1. Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Dari adanya perencanaan fasilitas sektor pariwisata ini sangat berdampak pada sosial ekonomi dikarenakan dari adanya Perencanaan fasilitas ini memberikan banyak kontribusi secara langsung terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata Kecamatan Parigi hal ini terbukti dari adanya peluang usaha, meningkatkan kenyamanan usaha, perubahan pendapatan dan berubahnya gaya hidup masyarakat di sekitar objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan BUMDes Cintaratu bahwa dengan adanya

perencanaan sangat berdampak sekali pada sosial ekonomi masyarakat hal ini terbukti dengan pemandu objek wisata di Jogjogan dalam seminggu dapat mengantongi pendapatan yang sangat besar serta pelaku usaha di sekitar objek wisata pun sangat terbantu dari adanya perencanaan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa dari adanya objek wisata sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, dari adanya objek wisata masyarakat sekitar dapat menambah pendapatan dengan cara menjadi tour guide, berjualan di sekitar objek wisata atau bahkan menjadi supir angkutan bagi wisatawan.

2. Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan. Perencanaan merupakan proses guna mencapai sebuah tujuan serta menentukan tahapan yang di perlukan dalam mencapai sebuah tujuan di masa depan. Perencanaan merupakan kegiatan yang terkoordinasi, di dalam perencanaan terdapat beberapa aktivitas diantaranya penentu tujuan, pembuatan strategi, serta mengembangkan rencana kerja. Kepala Kecamatan menyebutkan bahwa setiap perencanaan fasilitas pasti ada, terbukti dari rapat yang dilakukan dengan pengelola objek wisata terkait perencanaan fasilitas hal ini dikarenakan terdapat pencapaian yang ingin dicapai yaitu menjadi desa wisata terbaik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan keinginan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang diperlukan untuk mencapainya.
3. Perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut BUMDes Cintaratu mengatakan BUMDes Cintaratu telah membentuk tim khusus untuk mengadakan rapat yang diikuti oleh pemandu objek wisata, pelaku usaha sekitar objek wisata serta masyarakat terkait perencanaan yang akan di lakukan kedepannya kemudian dari hasil rapat tersebut dapat dijadikan bahan sebagai pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah, dalam pengambilan keputusan yang harus pertama di tentukan adalah penentuan tujuan, tujuan bersifat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap alternatif yang ada tanpa terkecuali.
4. Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Seperti yang kita tau bahwa program komprehensif adalah program yang dapat di terima baik oleh masyarakat, pengelola objek wisata santirah berpendapat bahwa sebuah objek wisata harus mengikuti program-program yang di buat oleh pemerintah, hal ini dapat mendukung perencanaan fasilitas yang ada di objek wisata, contohnya seperti santirah yang mendapatkan fasilitas umum seperti musola, kamar mandi, serta fasilitas wifi gratis yang di berikan Pak Sandiaga Uno kepada objek wisata Santirah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Kecamatan harus memberikan dorongan serta motivasi melalui program pelatihan terkait perencanaan dalam mengemas produk pariwisata.

## KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Perencanaan fasilitas sektor pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Kecamatan, BUMDes Cintaratu dan pengelola objek wisata Santirah di Kecamatan Parigi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan fasilitas di objek wisata Kecamatan Parigi terbilang kurangnya pemerataan dan belum maksimal, dibuktikan dari kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet, papan penunjuk arah, penginapan, serta

restourant di sekitaran objek wisata Kecamatan Parigi. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata masih terbatas, keterbatasan yang dimaksud adalah dimana kebijakan pemerintah belum terealisasi secara menyeluruh mulai dari sektor pariwisata, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas sarana dan prasarana, yang seharusnya kebijakan yang harus diikuti dalam pengembangan pariwisata adalah mengikutsertakan dalam event pariwisata, melakukan monitoring, melakukan bimbingan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM), evaluasi terhadap pelaku usaha pariwisata dan objek wisata, dan memudahkan dalam pengajuan perizinan.

Dari hasil penelitian diatas ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk menjadi referensi beberapa pihak diantaranya: Kepada Pemerintah Pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini diharapkan untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi secara terpadu terkait langkah-langkah awal untuk merencanakan fasilitas pariwisata apa saja yang cocok di bangun di setiap objek wisata Kecamatan Parigi, pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana, selain itu aparat desa maupun Kecamatan juga diharapkan membantu mempromosikan Desa Wisata yang bertempat di Kecamatan Parigi sehingga keinginan aparat dan masyarakat di desa maupun Kecamatan Parigi nantinya dapat segera terealisasi. Kepada Pengelola objek wisata diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki serta harus disesuaikan dengan perencanaan pengembangan fasilitas yang tepat dengan menggunakan pendekatan *Environmental and Sustainable development approach*, sehingga masyarakat juga diharapkan ikut terlibat dalam perencanaan fasilitas pariwisata tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitar objek wisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). Corporate Social Responsibility and Zakat: A Model of Philanthropy in the Society Era 5.0. *Jurnal Scientia*, 11(01), 565-574.
- Achmad, W. (2022). Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4985-4994.
- Achmad, W. (2022). Implementation of the Joint Business Group (KUBE) Program in Poverty Alleviation in Sumedang District. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1036-1042.
- Achmad, W., Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Sumadinata, R. W. S. (2022). Women's Social Capital for Empowering Poor Households. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Adikampana, I. M., & ADIKAMPANA, I. M. (2014).
- Angelina, J. A. (2019). Fasilitas Informasi Pariwisata di Martapura. *eDimensi Arsitektur Petra*, 7(1), 681-688.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*.
- Effendi, S. (2007). Perspektif Administrasi Pembangunan Kualitas Manusia dan Kualitas Masyarakat. In *Makalah Seminar Nasional HIPHIS*.
- Ilhami, R. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 57-67.
- Ilhami, R. (2020). Implementasi Pelayanan Konsultasi Perpajakan Pada Mall Pelayanan Publik. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Ilhami, R., Affandi, N. R., & Hartawan, Y. (2021). Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring Kebijakan Dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) Di Kabupaten Tangerang. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 214-222.
- Jhon Viter, M., Des, S., & Des, M. Perencanaan Fasilitas Kolam Renang Sebagai Sarana Penunjang Peningkatan Sektor Delaga Biru Porsea Kabupaten Tobasa Sumatera Utara.

- Mariane, I., Suryadi, S., Firdausijah, T., & Ilhami, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Public Private Partnership Bagi Peningkatan Pariwisata Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 71-76.
- Mukhsin, D. (2014). Strategi pengembangan kawasan pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(1).
- Ngusmanto, H. (2015). Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan
- Ocsuanda, V. (2018). Pengaruh Perkembangan Pariwisata terhadap Perkembangan Kota. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 2(1), 225-239.
- Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik.
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perencanaan Fasilitas Pariwisata (Tourism Amenitas) Pantai Pandawa Desa Kutuh Kuta Selatan Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 2(1).
- Pilihan, M. K. (2006). Ilmu administrasi publik.
- PrawiraW, R., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228-235.
- Septiani, S. (2020). Administrasi Pembangunan.
- Tarigan, Y. B. (2013). Penilaian Wisatawan terhadap Fasilitas Pariwisata di Wana Wisata Ciwangun Indah Camp Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Utari, P. S., & Kampana, I. M. A. (2014). Perencanaan Fasilitas Pariwisata (Tourism Amenities) Pantai Pandawa Desa Kutuh Kuta Selatan Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata* ISSN, 2338, 8811.